

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI SD NEGERI TAMAN SARI KOTA YOGYAKARTA

Fitri Indriani¹, Satrianawati²

¹²Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
Email: satrianawati@pgsd.uad.ac.id

Abstrak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi program yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan inklusi berbasis nilai-nilai pancasila di SD Negeri Taman Sari Kota Yogyakarta. Data diperoleh dengan menggunakan angket yang disusun berbasis nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, kedua, dan kelima. Objek penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah. Penelitian mengkaji tiga bagian dalam evaluasi program yaitu input, proses, dan output sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi yang disesuaikan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian melalui angket yang diberikan kepada kepala sekolah maupun guru menunjukkan bahwa input, proses dan output berada dalam kategori sangat baik yaitu $\geq 85\%$. Oleh karena itu, SD Negeri Taman Sari Kota Yogyakarta layak dikatakan sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan inklusi berbasis Nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci : pendidikan inklusi; nilai pancasila.

Abstract. This research is a type of program evaluation research that aims to measure the compliance level of organizing education inclusion-based Pancasila values in Taman Sari Elementary School. The collecting data obtained used an instrument base on The Pancasila values, especially the first sila, the second sila, and the fifth sila. The object of this research is a headmaster and a teacher. This research examines the three parts in the evaluation of the program i.e. inputs, process, and output in the school that implementing inclusive education programme the values of Pancasila. Research results by the question form provided both a headmaster and a teacher indicate that the input, process, and output are in the category of excellent i.e. $\geq 85\%$. Therefore, Taman Sari Elementary School of Yogyakarta is feasibility to be an inclusive school base on the Pancasila values.

Keywords : An inclusive education; The Values of Pancasila.

PENDAHULUAN

Hampir 10 tahun pendidikan inklusi diselenggarakan diberbagai sekolah di Yogyakarta. SD Negeri Taman Sari merupakan satu diantara beberapa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Sejak dikeluarkannya permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi, SD Negeri Taman Sari resmi melaksanakan program Pendidikan Inklusi. Program pendidikan inklusi bertujuan untuk menerapkan *Education For All* (EFA), di mana semua anak terutama anak berkebutuhan khusus (ABK) memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, pendidikan yang adil dan bermutu tanpa diskriminasi. Selain itu sekolah perlu menyiapkan layanan untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi, sebagaimana Erawati, et.al. (2016) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi sekolah harus mempersiapkan tenaga pengajar, kurikulum yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan khusus anak dan fasilitas penunjang lainnya untuk penanaman karakter bangsa. Tenaga pengajar merupakan faktor yang paling penting diantara faktor lainnya. Karena sikap tenaga pengajar atau guru mampu memberikan dampak positif maupun dampak negatif dalam perkembangan anak (Elisa & Wrastar, 2013). Oleh karena itu, sketsa pendidikan inklusi menunjukkan berbagai faktor yang mesti harus diperhatikan keberlangsungan programnya.

Fakta dari penelitian sebelumnya tentang pendidikan inklusi, sesungguhnya, penyelenggaraan pendidikan inklusi yang tampak di SD Negeri Taman Sari merupakan hasil bentukan dari sejumlah faktor yang berbeda diantaranya konteks sosial, politik, prakarsa orang tua, gerakan hak-hak sipil dan peundang-undangan pendidikan. Faktor-faktor ini mengupayakan tidak boleh ada siswa yang dikecualikan dari pendidikan atas landasan menyandang disabil-

itas. Seperti halnya di Malaysia sebagaimana Mahmud dan Ahmad (2014) menyatakan bahwa *“Like many countries of the world, the Kingdom is constitutionally bound to deliver education to its children as their fundamental rights. The educational principles in place in the country are mainly rooted from religious (Islamic) values. The formal educational system of the country consists of two stages: primary and secondary, which covers from the first to twelfth grades. Both stages of education are free for all citizens of the kingdom. Education is mandatory only for students in the primary stage. There is also a pre-school education in effect in the country, which was delivered for free of cost, but available is only in particular areas of the country.”*

Berdasarkan penelitian tersebut, tidak hanya Indonesia yang berusaha untuk menerapkan program pendidikan inklusi tetapi juga di negara Malaysia bahkan di seluruh negara yang ada di dunia. Sebagaimana pernyataan tersebut bahwa “seperti banyak negara di dunia, Kerajaan konstitusional terikat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak sebagai hak-hak dasar mereka. Prinsip-prinsip pendidikan terutama berakar dari nilai-nilai agama (Islam). Sistem pendidikan formal negara terdiri dari dua tahap: dasar dan menengah, yang mencakup kelas pada satu tahun pertama sampai pada dua belas tahun pendidikan. Pada tahap ini, pendidikan ini gratis untuk semua warga negara kerajaan. Pendidikan wajib hanya untuk siswa di panggung utama. Ada juga pendidikan pra-sekolah yang berlaku di negara ini, yang diberikan secara gratis di daerah-daerah tertentu.

Tidak hanya Malaysia, tentunya program pendidikan wajib, juga dilaksanakan di Indonesia dan untuk menjadi program pendidikan inklusi dibutuhkan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia tanpa memandang disabilitas yang dimilikinya. Hal

ini pula yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Olehnya itu, dalam penyelenggaraannya, pendidikan inklusi di SD Negeri Taman Sari sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama, sila kedua, dan sila kelima yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hasil survey di SD Negeri Taman Sari menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak diikuti dengan sarana dan prasarana program sehingga terkesan hanyalah program yang bekerja namun tidak dalam proses pelaksanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi sekaligus menggali informasi yang mendalam tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Taman Sari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak SD Negeri Taman Sari didapatkan informasi bahwa pertama) jumlah guru pendamping khusus (GPK) tidak sebanding dengan jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Kedua, anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan waktu pendampingan yang maksimal dari GPK. Kondisi ini memberikan informasi bahwa pendampingan siswa berkebutuhan khusus masih kurang dan lebih banyak bersama guru kelas, padahal siswa reguler di kelas sangat banyak. Hal ini tentu menjadi persoalan mendasar, sekaligus mengindikasikan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Taman Sari belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Garnida (2015: 113) menjelaskan terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas inklusi antara lain; (1) menciptakan suasana kelas yang hangat dan ramah serta mau menerima adanya perbedaan; (2) siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual; (3) pembelajaran yang diselenggarakan

dilakukan secara interaktif; (4) mau berkolaborasi dengan pihak terkait (profesi atau sumber daya lain) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi; (5) bersinergi dengan para orang tua dalam melaksanakan proses pendidikan. Prinsip pembelajaran di kelas inklusi sebagaimana dijelaskan oleh Garnida masih belum terlaksana dengan maksimal.

Kasus ini juga sebagaimana terjadi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi. Hal ini diketahui melalui penelitian yang dilakukan oleh Issabela, *et.al* (2014) di Jambi yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi program Pendidikan inklusi di SD Negeri 131/IV Kota Jambi menunjukkan bahwa Pendidikan inklusi memberikan keuntungan bagi siswa berkebutuhan khusus dan orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan inklusi belum memperhatikan standar penyelenggaraan pendidikan inklusi misalnya guru bantu atau *shadow* yang banyak berinteraksi dengan anak ketika berada di sekolah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi berbasis nilai-nilai Pancasila di Kota Yogyakarta.

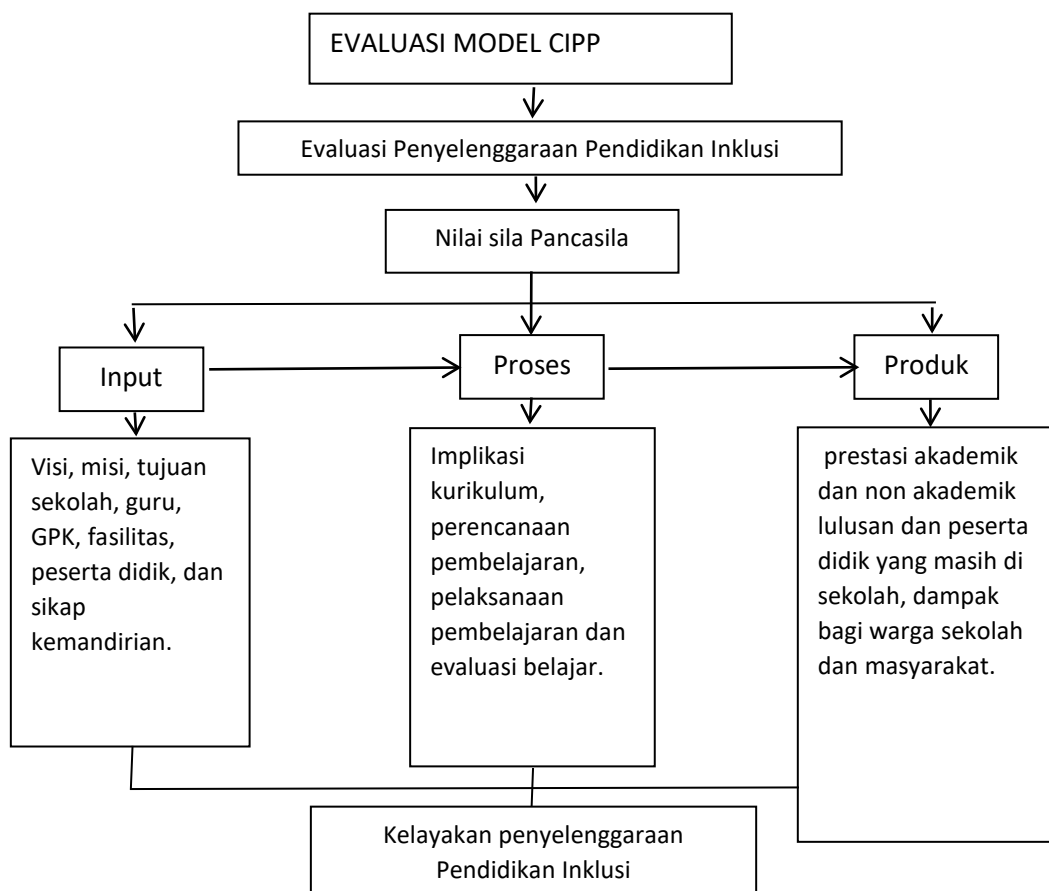
Kegiatan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Taman Sari yang berbasis nilai-nilai pancasila dikhususkan pada sila pertama, sila kedua, dan sila kelima yang ditinjau dari tiga aspek yaitu *input*, proses, dan *output* sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan inklusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kesesuaian penyelenggaraan pendidikan inklusi dengan nilai-nilai pancasila yang diselenggarakan di SD Negeri Taman Sari Kota Yogyakarta sekaligus memberikan manfaat pada badan atau lembaga pengambilan kebijakan tentang program yang tepat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian

evaluasi dengan menggunakan model CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam yaitu: *context*, *input*, *process*, dan *product*. *Context* merupakan upaya untuk menggambarkan kebutuhan yang tidak terpenuhi populasi dan sampel yang dilayani dan tujuan proyek. Dalam penelitian ini, konteks yang dimaksud adalah melihat kondisi real yang ada di lapangan dan menyusun tujuan untuk penyelenggaraan evaluasi program pendidikan inklusi di sekolah. Konteks juga mencakup banyaknya guru yang menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Konteks memberikan gambaran untuk kondisi nyata di lapangan untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Adapun untuk *input*, proses

dan *output* melanjutkan dari konteks yang ada di lapangan. Input berkaitan dengan Visi, misi, tujuan sekolah, guru, GPK, fasilitas, peserta didik, dan sikap kemandirian. Kedua, proses berkaitan dengan Implikasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi belajar. Ketiga, *output* berkaitan dengan prestasi akademik dan non akademik lulusan dan peserta didik yang masih di sekolah, dampak bagi warga sekolah dan masyarakat. Tujuan digunakannya model CIPP adalah untuk mengukur tingkat kesesuaian sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun kerangka penelitian yang digunakan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Analisis data bersifat kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui angket yang diisi oleh guru dan kepala sekolah yang mengajar di SD Negeri Taman Sari. Adapun data kualitatif diperoleh melalui wawancara yang dilakukan kepada guru dan kepala sekolah. Wawancara ini bersifat semi terstruktur dimana peneliti melakukan wawancara tidak berdasar pada konten catatan wawancara yang telah disiapkan namun menggali lebih dalam tentang informasi yang ada di sekolah dasar Negeri Taman Sari Yogyakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi disusun berdasarkan butir-butir pancasila pada sila pertama yang dihubungkan dengan *input*, proses, dan *output* dalam sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi. Alat evaluasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasar pada ketuhanan yang maha esa; kemanusiaan yang adil dan beradab; dan berdasar pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sila pertama, kedua, dan kelima didesain dengan menyesuaikan butir-butir pada pancasila yaitu, untuk sila pertama dengan beberapa butir yang dijadikan acuan sebagai berikut: (1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. (3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah

masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. (6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. (7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Selanjutnya untuk sila kedua yaitu: kemanusiaan yang adil dan beradab merujuk pada beberapa butir, yaitu: (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. (8) Berani membela kebenaran dan keadilan. (9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. (10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan orang lain.

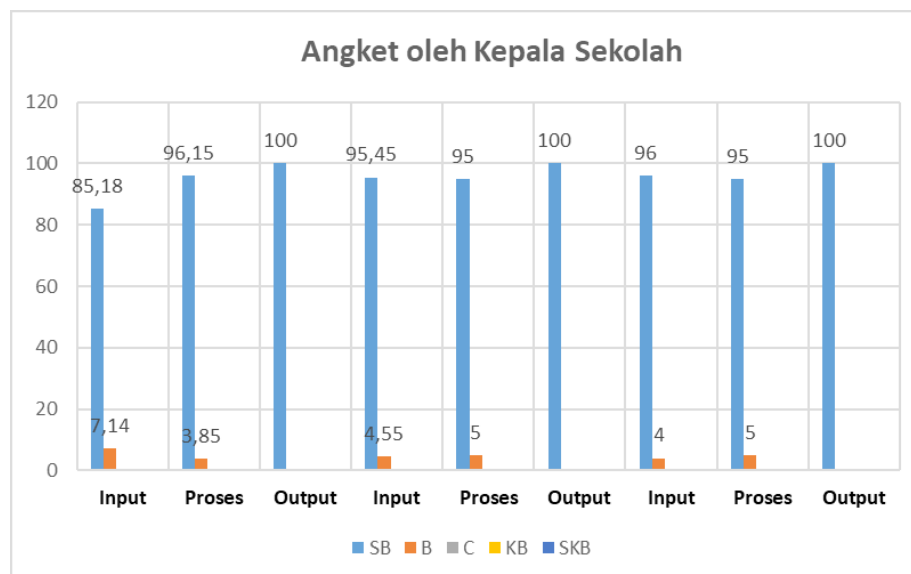
Selanjutnya untuk sila kelima dianalisis menghasilkan beberapa butir yaitu: (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. (4) Menghormati hak orang lain. (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. (6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. (7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. (8) Tidak menggunakan hak milik untuk ber-

tentang dengan atau merugikan kepentingan umum. (9) Suka bekerja keras. (10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. (11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

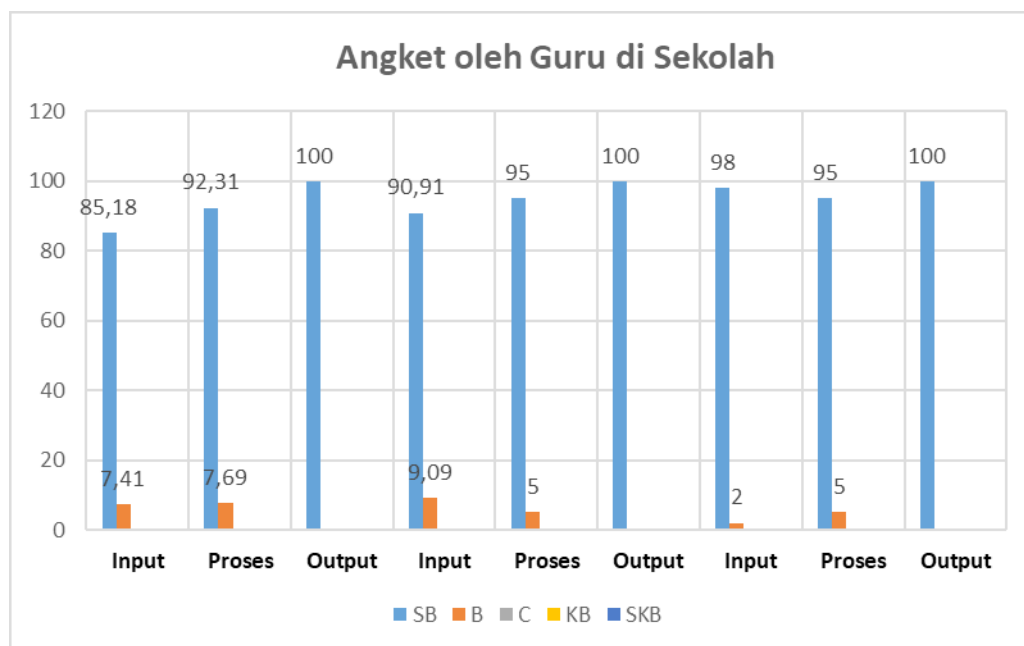
Hasil analisis butir-butir pancasila, kemudian dihubungkan dengan kriteria *input*, proses, dan *output* dalam sistem penyelenggaraan pendidikan inklusi yang dilihat dari aspek berikut: Pertama, *input* berkaitan dengan Visi, misi, tujuan sekolah, guru, GPK, fasilitas, peserta didik, dan sikap kemandirian. Kedua, proses berkaitan dengan Implikasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi belajar. Ketiga, *output* berkaitan dengan prestasi akademik dan non akademik lulusan dan peserta didik yang masih di sekolah, dampak bagi warga sekolah dan masyarakat (Isabella, et.al, 2014: 47).

Hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri Taman Sari Yogyakarta menunjukkan bahwa data diperoleh dengan menggunakan angket yang diisi oleh kepala sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi berdasar-

kan nilai-nilai pancasila sila pertama menunjukkan bahwa kategori *input*, proses, dan *output*. Ketiga kategori tersebut, sangat berkaitan dengan tindakan guru dan pihak sekolah dalam mengelola anak berkebutuhan khusus. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: untuk *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 85,18% dan kriteria baik dan cukup baik masing-masing yaitu 7,41%. untuk kategori proses dengan kriteria sangat baik yaitu 96,15% dan sisanya kategori baik 3,85%. untuk kategori *output* 100% berada pada kategori sangat baik. Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab menunjukkan *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 95,45% dan kriteria baik 4,55%. Untuk kategori proses dengan kriteria sangat baik yaitu 95% dan sisanya kategori baik 5% untuk kategori *output* 100% berada pada kategori sangat baik. Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menunjukkan bahwa untuk *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 96% dan kriteria baik 4%. untuk kategori proses dengan kriteria sangat baik yaitu 95% dan sisanya kategori baik 5% untuk kategori *output* 100% berada pada kategori sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada gambar 2 berikut.



Gambar 2. Grafik Pengisian Angket oleh Kepala Sekolah



Gambar 3 menunjukkan hasil pengisian angket oleh guru. Karena untuk mewujudkan sekolah ramah guru yang ramah merupakan syarat utama dalam mengembangkan metode layanan pembelajaran pendidikan inklusif (Wati & Sudarto, 2013). Angket yang diberikan pada guru mengacu pada tiga sila yaitu sila pertama, kedua, dan kelima. Pada penerapan pancasila sila pertama menunjukkan bahwa kategori *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 85,18% dan kriteria baik dan cukup baik masing-masing yaitu 7,41%. untuk kategori proses dengan kriteria sangat baik yaitu 92,31% dan sisanya kategori baik 7,69%. untuk kategori *output* 100% berada pada kategori sangat baik. Penerapan sila kedua kategori *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 90,91% dan kriteria baik 9,09%. untuk kategori proses dengan kriteria sangat baik yaitu 95% dan sisanya kategori baik 5% untuk kategori *output* 100% berada pada kriteria sangat baik. Penerapan sila kelima dengan kategori *input* dengan kriteria sangat baik yaitu 98% dan kriteria baik 2%. untuk kategori proses dengan kriteria sangat baik yaitu 95% dan sisanya kategori baik 5% untuk kategori *output* 100% berada pada kriteria sangat baik. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada gambar 3 berikut

Gambar 3. Grafik Pengisian Angket oleh Guru di Sekolah

Hasil penelitian yang dilakukan di SD Negeri Taman Sari menunjukkan bahwa untuk memberikan pemahaman pengetahuan baru kepada anak mesti dilakukan penguatan hubungan antara orang tua dan sekolah terhadap pengelolaan anak. Baik itu berupa layanan langsung maupun layanan tidak langsung. Friend and Burstuck (2015: 6) menjelaskan bahwa siswa penyandang disabilitas dapat memperoleh “layanan terkait” berupa bantuan di luar pengajaran akademis yang memungkinkan siswa untuk memperoleh manfaat dari pendidikan khusus. Upaya menemukan potensi sangat penting untuk mendapatkan bantuan dari guru pendamping khusus (GPK) dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Karena selama ini pemahaman tentang pendidikan inklusi masih mengarah pada bagian dari keprihatinan pemerintah untuk membawa anak-anak cacat ke sekolah. Padahal, berdasarkan Deklarasi Salamanca *inclusive education is understood as a developmental approach aiming to meet the educational needs*

of all children, youth, and adults emphasizing those who are subjected to marginalization and exclusion. The approach provides equal opportunities for all to reach their maximum potential and achievement (Spasovski, 2010: 67). Dalam deklarasi Salamanca menjelaskan bahwa pendidikan inklusif dipahami sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi semua anak-anak, pemuda dan orang dewasa yang menekankan orang-orang yang termarginalisasi dan pengecualian. Ini berarti ada berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi agar dapat diimplementasikan dengan maksimal. Untuk itu perlu dimulai dari hal-hal yang sederhana menuju hal yang kompleks. Sekalipun sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi berbasis nilai-nilai pancasila, namun semua itu harus ada dukungan penuh dari orang tua. Karena guru di sekolah butuh bantuan berupa dukungan orang tua dalam membantu siswa mengembangkan pengetahuan awal yang dimiliki. Olehnya itu, orang tua tidak boleh membiarkan anaknya begitu saja dan menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Sebagaimana Cyril dkk (2016: 7) *We found significant differences in the perception of family communication, family type and parenting styles between parents and children. These findings could be closely related to the intergenerational acculturation gap, which is the differing rates at which migrant parents and their children acculturate*. Hal ini menjelaskan bahwa temuan penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam persepsi komunikasi keluarga, jenis keluarga dan pengasuhan gaya antara orangtua dan anak. Temuan ini bisa berhubungan erat dengan kesenjangan antargenerasi akulturasi, yang merupakan harga yang berbeda di mana persepsi orangtua dan anak-anak mereka terakulturasi berdasarkan komunikasi dan pola asuh yang terbangun. Selain itu, Jachova, 2004 menjelaskan dari hasil penelitiannya

yaitu: *Both parents and the teachers find “the automatic inclusion” unacceptable; and Both parents and teachers accept the realization of the inclusive process.*

Jurnal penelitian ini menjelaskan bahwa baik guru dan orang tua harus bekerjasama dalam mencari hal yang tidak dapat diterima oleh anak. Guru-guru memiliki sikap yang lebih positif dibandingkan dengan orang tua terhadap penerimaan anak-anak kebutuhan khusus di sekolah-sekolah dimana guru tersebut mengajar. Guru menunjukkan perlunya dukungan guru khusus dengan desain pendidikan inklusi bagi anak dan orang tua dan guru perlu menerima pelaksanaan proses inklusif. Dari kedua jurnal tersebut menjelaskan bahwa guru tidak dapat berjalan sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang tua siswa dalam melakukan komunikasi dan pembelajaran. Seperti halnya di SD Negeri Taman Sari hubungan antara guru dan orang tua dalam proses pendidikan anak cenderung belum terbangun dengan baik terutama bagi orang tua dengan pekerjaan serabutan, yang setiap harinya fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kurang memperhatikan kondisi pendidikan anak di sekolah.

Allison, *et. al* (2016) dalam penelitian yang dilakukan tentang *Evaluation of Daily Physical Activity (DPA) policy implementation in Ontario: surveys of elementary school administrators and teachers* menemukan bahwa *“Several factors were found to be significantly associated with implementation fidelity in both school and classroom settings including: awareness of policy requirements; scheduling; monitoring; use of resources and supports; perception that the policy is realistic and achievable; and specific barriers to implementation”*. ada berbagai faktor yang secara signifikan berhubungan dengan implementasi keajegan dalam pengaturan sekolah dan kelas termasuk: kesadaran akan persyaratan Kebijakan; penjadwalan; pengawasan; penggunaan sumber daya yang mendukung; persepsi

bahwa kebijakan realistis dan dapat direngkuh; dan hambatan spesifik dalam pelaksanaan. Jurnal ini menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dimana dalam hal ini tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi sangat berkaitan dengan berbagai komponen di dalamnya. Olehnya itu, ketiga proses yang dijadikan dasar dalam penyusunan alat penelitian ini, nampak bahwa sekolah telah berupaya menyelenggarakan pendidikan inklusi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila namun yang terjadi ada berbagai komponen yang mempengaruhi misalnya keberadaan orang tua. Dimana kebanyakan para orang tua yang telah mengantarkan anaknya ke sekolah tidak ikut mengawal atau mengawasi proses pendidikan yang dijalani oleh anak. Kebanyakan orang tua hanya tahu bahwa anaknya telah bersekolah namun tidak berkomunikasi lagi dengan guru yang mengajar atau mendidik anak mereka di kelas.

Padahal banyak kendala yang dihadapi ketika mendidik anak dan untuk memecahkan kendala-kendala yang muncul diantaranya adalah guru pendamping harus berkoordinasi dengan guru-pendamping siswa lain dan juga dengan koordinator inklusi. Apabila diperlukan, maka ditindak lanjuti dengan mendiskusikannya dengan orang tua siswa, atau merekomendasikan untuk menemui psikolog atau psikiater ahli (Maftuhatin, 2014). ini berarti orang tua sangat tidak diperbolehkan menyerahkan semua tanggungjawab anak kepada guru. Faktanya yang terjadi di SD Negeri Taman Sari sangat kekurangan guru pendamping khusus dan bahkan hampir semua anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan yang maksimal. Ini juga mengakibatkan proses yang diupayakan berbasis nilai-nilai Pancasila tidak terselenggara secara maksimal.

Lebih lanjut, temuan dalam penelitian ini adalah pihak sekolah juga melakukan koordinasi dengan orang tua siswa terkait dengan *shadow* yang mesti dijadikan tanggung jawab

orang tua dan sekolah. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan proses inklusi yang menjadi hak anak dalam pembelajaran dan pendidikan yang layak. Akan tetapi untuk *shadow* lebih dibebankan pada orang tua karena tidak adanya biaya yang disediakan oleh sekolah. Oleh karena itu, di Sekolah Dasar Negeri Taman Sari melakukan *selective* dalam penerimaan siswa berkebutuhan khusus. Sekolah ini hanya menerima anak berkebutuhan khusus dengan jenis *slow learner*. Hal ini sangat beralasan karena sekolah tidak ingin melakukan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Cheng, et.al (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa “*future efforts should emphasize examining safe student-handling ergonomics, formulating policies regarding student-teacher ratio, incorporating mandatory break times at the workplaces, and promoting personal health for preventing work-related injuries*”. Penelitian ini mengungkapkan hubungan antara WMSDs dan pekerjaan tertentu fitur antara guru dan guru pembantu di sekolah pendidikan khusus. Usaha di masa mendatang harus menekankan memeriksa aman mahasiswa-penanganan ergonomi, merumuskan kebijakan mengenai rasio siswa-guru, menggabungkan saat istirahat wajib di tempat kerja, dan mempromosikan kesehatan pribadi untuk mencegah cedera terkait dengan pekerjaan. Informasi dari jurnal ini, agar pihak sekolah dalam penerimaan harus memperhatikan jumlah siswa disabilitas yang diterima dengan pelayanan pembelajaran yang akan diberikan. Faktanya, guru di SD Negeri Taman Sari merasa tidak puas dengan pelayanan yang telah diberikan kepada siswa karena guru menginginkan semua siswa memahami materi yang diajarkan. Namun di sisi lain, guru tidak dapat menolak karena mesti memperhatikan siswa yang lain juga. Selain itu, untuk *output* di SD Negeri Taman Sari masih belum memperlihatkan kemajuan yang baik, karena siswa di SD Negeri Taman Sari sangat banyak dan mempengaruhi tingkat interaksi guru dengan

anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas.

SIMPULAN

Evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri Taman Sari Yogyakarta menunjukkan bahwa dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusi telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama, kedua, dan sila kelima. Ketiga nilai Pancasila tersebut, dalam proses pendidikan inklusi sebagai pendukung baik dari sisi input, proses, maupun output. Input berkaitan dengan Visi, misi, tujuan sekolah, guru kelas, guru pendamping khusus (GPK), fasilitas, peserta didik, dan sikap kemandirian. Dari berbagai aspek ini menunjukkan bahwa semua telah sesuai namun guru pendamping khusus belum maksimal dalam mendampingi anak di sekolah karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru. Akibat dari minimnya jumlah GPK yang ada di sekolah inklusi. Proses berkaitan dengan Implikasi kurikulum, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi belajar. Ini sudah sesuai hanya ketiadaan GPK ikut mempengaruhi proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya, Output berkaitan dengan prestasi akademik dan non akademik lulusan dan peserta didik yang masih di sekolah, dampak bagi warga sekolah dan masyarakat. Output dari sekolah kurang maksimal karena kurangnya GPK dalam pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisson, K. R., Vu-Nguyen, K., Ng., B, Schoueri-Mychasiw N, Dwyer, JJ., Manson, H, Hobin, E., Manske, S., Robertson, J. 2016. "Evaluation of Daily Physical Activity (DPA) policy implementation in Ontario: surveys of elementary school administrators and teachers". *Springer Journal: BMC Public Health*, 16(1): 746
- Cheng, Hsin-Yi Kathy, Man-Ting Wong, Yu-Chung Yu & Yan-Ying Ju. 2016. "Work-Related Musculoskeletal Disorders and Ergonomic Risk Factors in Special Education Teachers And Teacher's Aides. *BMC Public Health* , 16(1):137
- Cyril, S., Halliday., Green., and Renzaho. 2016. "Relationship Between Body Mass Index And Family Functioning, Family Communication, Family Type and Parenting Style Among African Migrant Parents And Children In Victoria, Australia: A Parent-Child Dyad Study. *Springer Journal: BMC Public Health*, 2016, 16 (1): 707
- Elisa, Syafrida & Wrastari, Aryani Tri. 2013. "Sikap Guru Terhadap Pendidikan Inklusi Ditinjau dari Faktor Pembentuk Sikap". *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, 2(2): 1:10.
- Erawati, I. L., Sudjarwo, & Sinaga, R.M.. 2016. Pendidikan Karakter Bangsa Pada Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Pendidikan Inklusif. *Jurnal Studi Sosial*. 4 (1):20-29.
- Friend, M and Burstuck, D. W 2015. *Menuju Pendidikan Inklusi: Panduan Praktis untuk Mengajar(edisi ketujuh)*. Pustaka Pelajar: Celeban Timur, Umbulharjo, Yogyakarta.
- Garnida, D. 2015. *Pengantar Pendidikan Inklusi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Isabella, Paramita., Emosda, & Suratno. 2014. "Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di SDN 131 /IV Kota Jambi". *Jurnal Tekno-Pedagogi*, 4(2): 45-59.
- Jachova, Z. 2004. Inclusive Education of Children With Special Needs In Republic of Macedoni. *Journal of Special Education and Rehabilitation*, 1-2: 35-46.
- Maftuhatin, L. 2014. "Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Kelas Inklusif di SD Plus Darul 'Ulum Jombang". *Jurnal Studi Islam*, 5(2):

- 201-227.
- Mahnmud, S. A. S. H, Che Ahmad A. 2014. "Review of Special Education Programs in Jordan: Current Practices, Challenges, and Prospects". *J Spec Educ Rehab*, 15(3-4):24-42.
- Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*.
- Spasovski, O. 2010. *Principles of The Inclusive Education and The Role of Teachers and in-School Profesional Staff*. *Jurnal of Special Education and Rehabilitation*. 11(1-2).
- Wati, I. T.P. & Sudarto, Z. 2013. *Implementasi Kegiatan Belajar Mengajar Pada Sekolah Inklusif Di SMPN 29 Surabaya*. *Jurnal Pendidikan*. Pendidikan Luar Biasa.

